GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : **Suara Pembaruan** **Tanggal** : **16 Februari 2007**

Subyek : **Polisi Lingkungan** **Hari** : **Jumat**

Halaman : **12**

Di Puncak Perlu Dibentuk Polisi Lingkungan

[BOGOR] Kawasan Puncak, dengan wilayah dua kecamatan, yakni Kecamatan Megamendung dan Cisarua, Kabupaten Bogor yang setiap musim penghujan kerap dituding sebagai pembawa banjir ke Jakarta. Karena itu, sudah saatnya Pemkab Bogor membentuk polisi lingkungan guna menertibkan kawasan resapan air yang beralih fungsi menjadi bangunan vila mewah yang kini kian marak.

"Polisi lingkungan yang dibentuk itu, nantinya dapat bekerja sama dengan polisi kehutanan (polhut). Untuk efisiensi sumber daya manusia, dapat direkrut dari Polisi Pamongpraja yang sudah ada," ujar Drh Agus Lelana, Prohumas Institut Pertanian Bogor (IPB) kepada *Pembaruan* di Bogor, Kamis (15/2).

Selama ini, berdasarkan pengamatannya, banyak kawasan resapan air yang telah berubah fungsi menjadi lahan dan bangunan vila mewah. Bangunan vila mewah yang sudah ada dan belum mempunyai izin, di antaranya izin mendirikan bangunan (IMB), sebaiknya tidak dibongkar melainkan dikenakan pajak yang relatif cukup tinggi.

Dari penghasilan pajak terhadap bangunan vila mewah yang tercatat hampir berjumlah sekitar 400 lebih di kawasan Puncak, nantinya dapat dibuat program pembangunan Lubang Rersapan Biopore (LRB) yang baru ditemukan oleh seorang peneliti IPB.

Sampah

Sementara itu, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia akan membantu Pemerintah DKI Jakarta merehebilitasi Kota Jakarta pascabanjir baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek, Kadin akan membantu membersihkan sampah dan lumpur pascabanjir di seluruh DKI selama satu minggu yang akan dimulai Sabtu (17/2) Sedangkan untuk jangka panjang, Kadin akan membantu memperbaiki situ-situ, drainase dan daerah-daerah resapan air di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Demikian dikemukakan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Ketua Umum Kadin MS Hidayat kepada wartawan di kantor Wakil Presiden (Wapres) Jakarta, Kamis (15/2) sore setelah rapat koordinasi tentang rehabilitasi Jakarta pascabanjir.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Rapat yang dipimpin Wapres Muhammad Jusuf Kalla itu dihadiri puluhan pengusaha antara lain Ciputra, Siti Hartati Murdaya, dan Aksa Mahmud. Hadir juga sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu seperti Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Negara BUMN Sugiharto.

Sutiyoso menjelaskan, pembersihan sampah dan lumpur di Jakarta pascabanjir, kalau dilakukan sendiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan memakan waktu yang cukup lama. Alasannya, alat-alat berat seperti truk yang dimiliki Pemerintahan Provinsi DKI sangat terbatas. Dia menambahkan, pascabanjir jumlah sampah dari kali di DKI Jakarta mengalami peningkatan sebanyak 1.000 ton.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengaku kecolongan atas tindakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah membuang sampah sisa banjir ke kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor, pada hari Selasa (13/2) sekitar pukul 16.30 WIB.

Wakil Bupati Bogor, Albert Pribadi mengatakan, hingga kini Pemrov DKI belum memiliki izin dan koordinasi masalah pembuangan sampah di Jonggol. Pemkab Bogor akan segera melayangkan surat protes ke Gubernur DKI Sutiyoso. Jika tidak digubris, sampah itu akan dikembalikan lagi ke Jakarta. [126/A-21]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup